

KEMAMPUAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN: PEMBELAJARAN DARI INDONESIA TIMUR

Krisdyatmiko

Abstract

The sufficiency of foods constitutes one of the parameters of human wellbeing. The fact is, the foods availability cannot catch the fast growth of population. For Indonesia, the foods scarcity is a kind of paradox of the agrarian country blessed with abundance of natural resources. The policies on food have yet taken side to the systems of production and distribution met fully by the domestic yealts. The efforts to realize food security tend to be meant as the sufficient availability of foods, thus importing foods become the solution when scarcity is hitting. Whereas, with such abundance of both human and natural resources Indonesia should be able to meet its needs of food, more than that, if the farming sector is handled seriously it will result in competitive commodities at international, so as the farming can be as the main basic livelihoods of the Indonesian farmers. The main key is the food sovereignty, prioritizing the domestic foods production, supported with policies siding to the Indonesian farmers as the main producers to meed foods and other commodities.

Local experiences from villages of Eastern Indonesia show that the communities can meet their need of foods, and put the farming as their livelihoods. Even in an areas, formerly hit by food vulnerability, the villagers supported by the local government can develop creativity to rearrange the system of crops production, so that it can obtain the surplus of foods production. It is due to the enggagement of the elements of community and local government, thus, there appears local movements that can make a meaningful change to the improvement of community welfare. This local based experience become a lesson learned, that the village can become the basis of food security and livelihood for the villagers,

hence it can strengthen village impacting to the wellbeing improvement of Indonesian people which are mostly living in villages.

Keywords: *food security, food sovereignty, village, engagement*

A. Pendahuluan

Kekhawatiran akan kerawanan pangan yang telah disampaikan Thomas Robert Malthus pada tahun 1798 akhirnya mulai terbukti. Saat itu, Malthus menyatakan bahwa penduduk dunia cenderung tumbuh secara tak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Kenaikan suplai makanan terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga eksistensi manusia. Manusia akan mengalami kemiskinan yang ditandai dengan kelaparan akibat kelangkaan bahan pangan.¹

Data tentang kelangkaan pangan menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2007, dunia telah mengalami defisit stok pangan 5 kali, yaitu tahun 2000, 2002, 2003, 2006, dan 2007. Namun, menurut *Sunday Herald*, krisis pangan tahun 2008 menjadi krisis global terbesar abad ke-21 yang menimpa 36 negara di dunia, termasuk Indonesia.² Krisis pangan ditandai dengan makin melemahnya aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan, salah satunya akibat harga pangan yang terus meningkat. Secara umum, harga pangan pada tahun 2008 meningkat sampai 75% dibandingkan tahun 2000. Di Indonesia, Data Departemen Pertanian menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan penting mengalami kenaikan lebih dari 50% selama periode 2005-2007, bahkan harga kedelai naik sekitar 114%. World Food Program (WFP) – PBB menyatakan bahwa akibat melejitnya harga pangan dunia, sekitar 100 juta orang di tiap benua terancam kelaparan. Oxfam, sebuah LSM dari Inggris, memperkirakan setidaknya 290 juta orang terancam kelaparan akibat krisis pangan kali ini.³

Krisis pangan global ini justru terjadi saat 189 negara anggota PBB telah menyepakati Resolusi Majelis Umum PBB nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹ Michael H. Hart, *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*, (New York: Citadel Press Book, 1992), hlm. 395.

² Krisdyatmiko (editor), “Pengembangan Strategi Penyuluhan di Tengah Perubahan Konfigurasi Politik dan Orientasi Pembangunan”, pengantar editor dalam S.Djuni Prihatin, *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani: Dalam Ancaman*, (Yogyakarta: Intan Cendekia, 2010), hlm. xxix

³ Krisdyatmiko (editor), *Ibid.*

(A/RES/55/2. *United Nations Millennium Declaration*) dalam KTT milenium PBB pada September 2000. Deklarasi ini lebih dikenal sebagai *Millennium Development Goals* (MDGs) yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama, mengedepankan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Terdapat delapan tujuan pembangunan milenium, tujuan pertama adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan dengan salah satu targetnya untuk menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu sampai tahun 2015.⁴

Kecenderungan kenaikan harga pangan dunia, termasuk di Indonesia, menggugah pemerintah untuk mencanangkan Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005 – 2010. Bagi pemerintah, ketahanan pangan pada tataran nasional diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik.⁵ Tetapi, rencana ini ternyata tak menjamin ketahanan pangan Indonesia, fluktuasi produksi pangan terus terjadi. Data BPS yang diumumkan November 2011 menyebutkan bahwa produksi padi tahun 2011 diperkirakan 65,4 juta ton gabah kering giling atau turun 1,63% dibanding produksi padi tahun 2010 yang tercatat 66,4 persen. Produksi jagung juga turun 6% menjadi 17,2 juta ton, sehingga para pelaku ekonomi pakan ternak masih harus mengimpor jagung sampai mendekati 2 juta ton. Produksi kedelai turun 4 % menjadi 870 ribu ton, sangat jauh untuk memenuhi konsumsi kedelai 2,5 juta ton.⁶ Puncak dari kelangkaan kedelai ini terjadi pada pertengahan tahun 2012 yang mengakibatkan mahalnya harga kedelai sehingga beberapa industri kecil tahu dan tempe menghentikan produksinya.

Hasil evaluasi Indeks Ketahanan Pangan Global yang dikeluarkan Economist Intelligence Unit (EIU) pada Juli 2012 menyebutkan bahwa ketahanan pangan Indonesia hanya berada pada posisi kelima di antara tujuh negara ASEAN yang dievaluasi. Peringkat pertama diduduki

⁴ Peter Stalker, *Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*, (Jakarta: Bappenas-PBB, 2007), hlm. 9.

⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, *Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005 – 2010*, www.pustaka-deptan.go.id/bppi/lengkap/bpp05004.pdf, hlm.1.

⁶ Bustanul Arifin, *Penurunan Produksi Pangan dan Harapan pada GP3K*, www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/11/05/215/Penurunan-Produksi-Pangan-dan-Harapan-pada-GP3K, hlm. 1.

Malaysia dan diikuti dengan Thailand, Vietnam dan Filipina.⁷

Bagi Indonesia, krisis pangan merupakan paradoks sebagai sebuah negara agraris. Lantas di mana letak kesalahannya, apakah petani Indonesia telah mengalami kemunduran pengetahuan dan ketrampilan dalam tata cara produksi pertanian, atau kondisi alam seperti pemanasan global yang menyebabkan gagal panen, atau sebenarnya permasalahan ini terletak pada lemahnya tata kelola kebijakan dan program yang berkaitan dengan pangan khususnya dan pertanian pada umumnya? Tulisan ini akan mengurai peta permasalahan pangan di Indonesia, khususnya di tingkat kebijakan, kemudian memberi ilustrasi pengalaman di tingkat lokal tentang keberhasilan mewujudkan ketahanan pangan, serta diakhiri dengan rekomendasi kebijakan khususnya terkait dengan UU Pangan yang telah disahkan pada akhir 2012.

B. Kajian Regulasi dan Wacana tentang Ketahanan Pangan

Kebijakan tentang pangan yang saat ini berlaku di Indonesia tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Belum banyak pengaturan lanjutan atas UU yang belum lama disahkan pada Oktober 2012. Tetapi, jika mengacu pada UU Pangan sebelumnya (No. 7/1996), ada beberapa pengaturan lain yang berkaitan dengan pangan, seperti: Keppres Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan yang kemudian diperbaharui dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, serta PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Baik dalam UU 7/1996 maupun PP 68/2002 disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Konsep ini mengacu pada terpenuhinya pangan pada tingkat rumah tangga, bukan pada individu. Jika pangan dipandang sebagai bagian hak asasi warga negara, maka hak atas pangan perlu diletakkan pada tingkat individu. Pemerintah pun telah merespon hak individu ini dengan melakukan revisi atas makna ketahanan pangan. Dalam UU 18/2012, disebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

⁷ —, *Balada Negeri Impor*, dalam “Kedaulatan Rakyat”, 31 Juli 2012.

produktif secara berkelanjutan.

Hak atas pangan merupakan hak paling asasi dari setiap warga negara. Konsep ketahanan pangan dalam UU 18/2012 merupakan terobosan dari pemerintah untuk berani menjamin ketersediaan pangan sampai tingkat individu. Setiap warga negara berhak atas pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat individu di dalam rumah tangga, pada skala nasional dan lokal sepanjang waktu. Negara berkewajiban untuk menangani masalah kerawanan pangan yang biasanya ditimbulkan oleh bencana, gejolak harga dan konflik sosial dan kerawanan pangan kronis, yang sering menimpa ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan masyarakat miskin. Sebaliknya, masyarakat miskin dan kelompok rawan pangan tetap diberi hak, tanggung jawab, dan kesempatan untuk diberdayakan agar mereka mampu memenuhi penyediaan pangan di tingkat rumah tangga dan individu sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan ketergantungan berlebihan pada pemerintah dalam pemenuhan kebutuhannya.⁸

Dalam memenuhi ketersediaan pangan yang cukup, Pasal 47 ayat 3b UU 7/1996 menyebutkan bahwa Pemerintah mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional. Lebih lanjut Pasal 15 dan 16 PP 68/2002 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan didukung melalui kerjasama internasional meliputi bidang (a) produksi, perdagangan dan distribusi pangan; (b) cadangan pangan; (c) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; (d) riset dan teknologi pangan. Makna dari kebijakan ini bahwa untuk memenuhi ketahanan pangan di Indonesia dibuka peluang keterlibatan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.⁹

Dalam UU 18/2012 telah ada upaya untuk mengurangi kekhawatiran terhadap impor pangan sebagai cara pemenuhan ketersediaan pangan. Dalam Pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi

⁸ Bustanul Arifin, *Berharap Banyak pada Revisi Undang-Undang Pangan*, <http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/02/07/136/berharap-banyak-pada-revisi-undang>, hlm. 2.

⁹ Kekhawatiran akan peran swasta yang menempatkan pangan sebagai komoditas bisnis telah diminimalisir dalam Pasal 26 UU 18/2012. Pasal ini menyebutkan bahwa “Pemerintah dapat mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan Cadangan Pangan Nasional”. Dalam ketentuan umum, disebutkan bahwa pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Jika dicermati arti pelaku usaha pangan, masih sangat terbuka peluang untuk sektor swasta berperan dalam pemenuhan pangan.

dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, ayat 2 menyatakan bahwa impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Pada kenyataannya, Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Meskipun telah ada regulasi agar memperhatikan kepentingan produksi dalam negeri, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa impor pangan Indonesia bisa dikategorikan besar. Padahal, pemerintah mengakui bahwa salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan adalah ketergantungan ketersediaan pangan nasional terhadap impor.¹⁰

Tabel 1
 Nilai Impor dan Ekspor Pertanian – Pangan Tahun 1999 dan 2004
 (dalam ribuan US\$)

No	Komoditas	Tahun 1999		Tahun 2004	
		Impor	Ekspor	Impor	Ekspor
1.	Beras (primer)	1.327.459	2.800	61.753	457
2.	Gandum (primer)	406.067	134	841.268	3.294
3.	Jagung	80.319	11.037	177.675	9.074
4.	Kacang tanah	38.625	2.931	40.539	5.352
5.	Kedelai	301.688	18	299.219	501
6.	Ubi jalar	2	1.545	3	5.209
7.	Ubi kayu	0	23.454	398	20.400
8.	Sayur mayur segar/ dingin	58.283	23.407	79.343	20.329
9.	Buah-buahan	56.153	20.242	215.525	13.293
10.	Ternak hidup	49.383	25.590	100.036	20.228
11.	Daging segar beku	25.107	4.554	58.493	10.148
12.	Telur	0	102	347	108
13.	Susu dan produk susu	83.139	2.223	329.383	40.935
14.	Kelapa	233	266.248	1.867	823.316
15.	Kopi	3.089	352.762	6.867	344.077
16.	Teh hijau	615	97.847	5.531	98.572
17.	Lada	9.177	191.241	333	55.637
18.	Kakao	15.699	423.321	86.003	549.348
19.	Beras olahan	116	1.708	3.195	1.006
20.	Gandum olahan	94.437	62.240	149.452	163.825

Sumber: Witoro, 2006, hlm. 229.

¹⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, *Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005 – 2010*, www.pustaka-deptan.go.id/bppi/lengkap/bpp05004.pdf, hlm. 1.

Data perbandingan impor bahan pangan antara tahun 1999 dan 2004 dalam tabel di atas menunjukkan bahwa dari 20 komoditas pangan, 17 komoditas (85%) di antaranya mengalami kenaikan jumlah impor. Meskipun kenaikan ini bisa disebabkan harga dasar pangan yang meningkat dalam durasi 1999 – 2004 (karena datanya berdasar harga dalam US\$), namun data ini tetap menunjukkan ketergantungan pangan Indonesia pada impor.

Rupanya pemerintah memaknai ketahanan pangan (*food security*) dalam arti tersedianya bahan pangan bagi warga negara, tidak memperdulikan darimana asal bahan pangan tersebut. Wahono menyatakan bahwa ketahanan pangan harus dimaknai sebagai *food sovereignty*, bukan semata-mata *food security*. *Food sovereignty* harus mengandalkan kerja dan kontrol asset produksi oleh petani sendiri. Berbeda dengan *food security* tidak menjadikan kerja dan kontrol asset produksi ada dalam kendali petani, negara pun dapat menggantikan peran petani, perusahaan/korporasi dapat mengontrol semua *resources* dari petani. Wahono menegaskan, kebijakan impor beras terus-menerus adalah kebijakan *food security*, bukan *food sovereignty*.¹¹

C. Pengalaman Lokal dalam Ketahanan Pangan

Apakah benar Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sehingga harus impor? Pengalaman di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan sebaliknya, desa-desa mampu memenuhi kebutuhan pangan, bahkan di desa yang dikategorikan sebagai bagian dari daerah rawan pangan. Sebagai contoh di Desa Eno Neontes Kabupaten Timor Tengah Selatan – NTT. Meskipun secara nasional Kabupaten TTS dimasukkan sebagai salah satu daerah rentan/rawan pangan¹², namun pada kenyataannya masyarakat desa ini memiliki ketahanan pangan yang handal. Berbasis pada kearifan lokal dalam bentuk tempat tinggal yang disebut “rumah bulat”, warga mengembangkan konsep “lumbung kampung”. Rumah bulat merupakan perpaduan antara tempat tinggal dan lumbung pangan. Sebagai tempat tinggal dengan segala aktivitas rumah tangga, api di rumah bulat selalu menyala untuk

¹¹ Francis Wahono, *Kedaulatan Pangan: Agri-Culture bukan Agri-Business, Mensiasati Negara Lupa Bangsa*, dalam Suharman (editor), *Bunga Rampai Pemikiran Pedesaan 2002-2008*, (Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, 2008), hlm. 23 – 38.

¹² Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan World Food Programme, *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009*, (Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan World Food Programme, 2009), hlm. 96.

memasak makanan sekaligus mengawetkan bahan pangan (jagung, ubi, kelapa, kacang-kacangan, dan bibit jagung, dll) yang disimpan di bagian atas rumah bulat sehingga tidak mudah rusak. Makna rumah bulat (*Ume Kʼbubu*) atau lumbung keluarga itu diperluas menjadi lumbung pangan kampung di mana sumber pangan keluarga tidak hanya terletak pada rumah bulat namun juga terletak di lingkungan sekitar. Lahan atau kebun dimanfaatkan untuk tanaman dan ternak guna mencukupi kebutuhan keluarga dan dijual. Sebagian dari hasil penjualan produk pertanian/peternakan disimpan dalam koperasi atau bank sebagai tabungan.¹³

Pemanfaatan lumbung pangan dilakukan pula oleh warga Desa Bumi Pajo, Kabupaten Bima – NTB. Mereka tidak menjual padi hasil panen, melainkan hanya disimpan untuk konsumsi sendiri. Setiap keluarga memiliki lumbung hasil pertanian di sekitar rumahnya. Walau pendapatan yang diperoleh relatif kecil, warga tidak perlu khawatir kebutuhan konsumsi setiap harinya. Mereka punya cadangan pangan (gabah/beras) yang setiap saat dapat dimasak. Selain itu, warga juga memanfaatkan pekarangan yang ditanami sayur-sayuran dan memelihara ternak. Ternak kecil seperti ayam dan itik dimanfaatkan telur atau dagingnya, sedangkan ternak besar seperti sapi sebagai tabungan yang akan dijual bila ada kebutuhan yang mendesak.¹⁴

Model pemanfaatan hasil panen yang diprioritaskan untuk konsumsi sendiri, ternak sebagai tabungan keluarga, menjadi antitesis atas kritik Scoot pada tahun 1980-an. Menurut Scoot, tipe petani di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah petani yang enggan berisiko (*risk-averse*) dan dahulukan selamat (*safety-first*). Mereka mengembangkan etika subsistensi, tidak berani mengambil keputusan-keputusan yang berisiko akan berakibat gagal panen sehingga terpaksa menjual ternak atau lahannya, yang makin memperkecil kemungkinan untuk mencapai subsistensi yang memadai tahun berikutnya.¹⁵ Cara bertahan hidup yang

¹³ Dyah Widuri, Agustinus Banu dan Bambang Hidayana, *Membangun Lumbung Menuju Ketahanan Pangan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur*, *Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID – IRE, 2012), hlm. 12.

¹⁴ Ninik Handayani, Zuriati dan Sutoro Eko, *Gerakan Membangun Kemandirian Desa: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*, *Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID – IRE, 2012), hlm. 9.

¹⁵ James C. Scoot, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 3-4.

dikembangkan petani seperti ini, yang dikritik Scoot di tahun 1980-an, ternyata sampai sekarang tetap eksis dan terbukti menjamin ketahanan pangan keluarga tani.

Revitalisasi kearifan lokal dengan mengembangkan lumbung pangan dilengkapi dengan upaya peningkatan kapasitas, baik di tingkat individu maupun kelembagaan. Warga masyarakat yang mayoritas petani dilatih tentang pengolahan lahan pertanian tepat guna dan pascapanen, pembuatan pupuk organik dan embung mini warga, yang kemudian diikuti dengan pembukaan kebun contoh. Di tingkat kelembagaan, dilakukan revitalisasi kelompok tani/KT. Ada beberapa KT seperti KT Tol Feu, KT Nekmese, KT Fetomone dan satu kelompok wanita tani (KWT Mawar), yang membuat aturan-aturan dalam mengelola kebun kelompok. Semua anggota harus wajib bekerja ke kebun (*tofa*) untuk membersihkan lahan, menyiapkan kebun, menyemai, menanam, menyiangi rumput, dan menyiram tanaman pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kelompok. Hasil panen dibagi untuk anggota kelompok dan sebagian dimasukkan ke kas kelompok. Kerja di kebun kelompok harus menyesuaikan dengan kerja di ladang pribadi masing-masing anggota. Selain mengelola kebun kelompok, sebagian kelompok juga merintis usaha simpan pinjam, menyelenggarakan arisan, ibadat, menganyam dan menenun.¹⁶

Peningkatan kapasitas petani membuahkan hasil dalam pengembangan tata kelola pertanian. Petani Desa Eno Neontes yang semula hanya mengandalkan tanaman jagung sebagai makanan pokok, kemudian mulai melakukan diversifikasi tanaman seperti ubi kayu, ubi jalar, kacang-kacangan, pisang, dan padi. Kini setiap rumahtangga memiliki puluhan pohon pisang yang buahnya dikonsumsi untuk sarapan dan pada waktu-waktu tertentu dijual untuk membeli beras.

Peningkatan kapasitas di tingkat kelompok pun telah membuahkan hasil. Kelompok-kelompok tani mengembangkan berbagai pangan lokal dalam kebun kelompok seperti kacang panjang, buncis, sawi putih, parai (pare), tomat, cabe, bawang merah, terong dan labu sayur. Kebun kelompok menjadi bagian perubahan pola pertanian yang semula dengan cara membakar lahan, berubah dengan cara menyemai, menanam, memupuk, menyiangi, menyiram secara rutin, dan memanennya. Pengalaman di kebun kelompok ini dipraktikkan oleh para anggota di kebunnya masing-masing.

Perubahan pola pertanian juga dilakukan di Desa Lanci Jaya

¹⁶ Dyah Widuri, Agustinus Banu dan Bambang Hidayana, *ibid*, hlm. 18.

Kabupaten Dompu NTB yang mengubah pertanian tadah hujan menjadi irigasi teknis dengan memanfaatkan embung/DAM. Sebelum ada embung, petani hanya melakukan satu kali tanam padi gogo per tahun dengan hasil 0,5 - 1 kuintal per hektar gabah kering atau jika ditanami kedelai dengan hasil panen satu ton per hektar. Hasil panen padi gogo tidak dijual dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan selama satu tahun. Setelah ada embung, petani Desa Lanci Jaya bisa melakukan tiga kali penanaman (padi-padi-jagung/kedelai). Hasil panen bertambah banyak menjadi sekitar 6 ton per hektar gabah kering, atau 6-7 ton per hektar kedelai, atau 7-8 ton per hektar jagung.¹⁷

Seiring dengan pemanfaatan embung, warga membentuk lembaga P3A (Petugas Pengatur Pemeliharaan Air) yang memelihara, mengawasi, dan mengatur saluran penggunaan air irigasi. Jika ada saluran irigasi yang rusak/tertimbun maka warga atau petugas air di desa berinisiatif untuk mengumumkan di Masjid untuk melakukan gotong royong memperbaiki saluran tersebut. Di kalangan masyarakat, juga dikembangkan sistem gotong-royong atau *barter* tenaga kerja. Jika warga membantu tetangganya untuk menanam padi selama satu minggu, maka tetangga itu akan membalas membantu selama seminggu untuk menanam padi di sawah miliknya.

Gotong royong dalam pengolahan lahan pertanian dikembangkan pula di Desa Bumi Pajo, Kabupaten Bima NTB yang mengembangkan sistem "*waha rima*". Sistem ini sangat membantu keluarga tani yang kekurangan modal untuk membayar upah tenaga kerja baik dalam mengelola lahan maupun panen.¹⁸

Gotong royong antar warga dilengkapi pula dengan model jaminan sosial lokal seperti yang dilakukan masyarakat Desa Eno Neontes, Kabupaten TTS-NTT. Di desa ini, para tuan tanah memiliki kewajiban moral untuk menolong warga yang kekurangan pangan. Tuan tanah menyediakan lahan tanpa sewa untuk warga miskin agar diolah dan ditanami jagung. Jika memungkinkan, hasilnya dibagi dua, jika tidak, semua hasilnya diberikan untuk warga miskin yang menggarap lahan tersebut. Apabila pemilik tanah mengadakan hajatan atau sedang dalam kedukaan, penggarap tanpa diminta terlibat dalam setiap kegiatan ritual tersebut.

¹⁷ Ninik Handayani, Syafrudin dan Sutoro Eko, *Transformasi Modal Sosial ke Modal Ekonomi: Pelajaran Berharga Dari Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, (Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID - IRE, 2012), hlm. 27.

¹⁸ Ninik Handayani, Zuriati dan Sutoro Eko, *ibid*, hlm. 10.

Selain kerjasama internal warga desa, dilakukan pula kerjasama antardesa. Warga Desa Eno Neontes mampu menciptakan jaringan (*networking*) dengan desa-desa di sekitarnya. Jaringan ini yang kemudian memudahkan pemenuhan kebutuhan pangan. Saat ini ada 30 warga desa Eno yang sudah memiliki relasi kerja dengan pemilik sawah di wilayah Oesao Kabupaten Kupang yang jaraknya cukup jauh dari desa Eno.¹⁹

Emansipasi warga desa dalam mengembangkan sistem ketahanan pangan pada dasarnya tidak terlepas dari komitmen pemerintahan desa dalam mendorong pertanian yang tangguh. Hal ini bisa ditemui di Desa Wa Ode Angkalo, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara yang memiliki visi: “Desa Wa Ode Angkalo menjadi desa swasembada pangan pada tahun 2015”. Dalam penjelasan visi dikatakan bahwa dengan mengandalkan sektor pertanian yang didukung oleh potensi sumber daya alam, Desa Wa Ode Angkalo mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri serta menjadikan desa sebagai salah satu desa yang memproduksi dan menyuplai pangan di Kecamatan Bonegunu.²⁰

Pemerintah Desa Mbatakapidu, Sumba Timur NTT mengintegrasikan program ketahanan pangan dalam sistem perencanaan desa. Melalui proses musyawarah desa, pemerintahan desa merumuskan program komoditas untuk menanam tanaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Program ini ditempuh melalui diversifikasi jenis tanaman, misalnya jenis tanaman jangka pendek yang semula hanya monoton dengan bertanam jagung, diubah dengan kebiasaan baru untuk menanam aneka ragam jenis tanaman yang berumur pendek. Tanaman jangka menengah dikembangkan dengan menanam pohon kelapa, pisang, sukun, sirsak, pepaya, kemiri, jambu mete, nangka, mangga dan lainnya. Sedangkan tanaman jangka panjang ditempuh dengan cara setiap rumah tangga diharuskan menanam minimal sebanyak 1.000 pohon tanaman umur panjang, seperti: pohon mahoni, jati lokal, dan gamalina.²¹

¹⁹ Dyah Widuri, Agustinus Banu dan Bambang Hidayana, *ibid*, hlm. 17.

²⁰ Titok Haryanto, *Warga Bergerak Melawan Kemiskinan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID – IRE, 2012), hlm. 20.

²¹ Abdur Rozaki, *Dari Desa Krisis Pangan Menuju Mandiri Pangan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID – IRE, 2012), hlm. 7.

Untuk memastikan bahwa ketiga jenis tanaman benar-benar ditanam di kebun warga, pemerintah desa membuat sebuah kartu kontrol. Kartu ini di samping menjelaskan identitas masing-masing rumah tangga, juga menjelaskan aset yang dimiliki seperti luas lahan, jenis tanaman jangka pendek-menengah-dan panjang, ternak, serta alat-alat pertanian yang digunakan. Kartu kontrol dibuat rangkap tiga, pertama untuk ditempelkan di depan rumah sehingga langsung dapat dilihat ketika ada pengawasan dari pemerintah desa atau dapat dilihat/dibaca oleh orang lain. Rangkap kedua, untuk disimpan di dompet atau yang mudah untuk dibawa kemana-mana, jika sewaktu-waktu ada pertanyaan dari pemerintah desa atau orang lain yang bersangkutan dapat membuktikan dengan menunjukkan kartu ini. Rangkap ketiga, digunakan untuk memperbanyak pada tahun berikutnya jika jumlah aset yang dimiliki semakin banyak atau bertambah.²²

Kartu kontrol juga dimanfaatkan sebagai bentuk pengawasan internal atas apa yang dimiliki oleh setiap rumah tangga. Sedangkan bentuk pengawasan eksternal melalui tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan melalui SK Kepala Desa Mbatakapidu²³. Tim ini terdiri dari kepala desa, RW, RT dan PKK pada tingkat desa yang juga melibatkan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan (BP3K) dan PPL dari tingkat kabupaten.

Untuk memenuhi kecukupan bibit berbagai jenis komoditas tanaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, Pemerintah Desa Mbatakapidu melakukan beberapa cara, yakni: *pertama*, secara swadaya mengumpulkan bibit pohon dan anakan dari pekarangannya sendiri atau dengan cara mencari melalui jejaring pertemanan atau perkerabatan lainnya. *Kedua*, diambilkan dari alokasi dana desa/ADD untuk belanja bibit pohon. *Ketiga*, mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Sumba Timur dan *stakeholders* lainnya, seperti GTZ, VECO, dan Yayasan Pahadang Manjuru sebagai mitra ACCESS.²⁴

²² Abdur Rozaki, *ibid*, hlm. 14.

²³ Keputusan Kepala Desa Mbatakapidu No.03/2011 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa Sektor Pertanian dan Kehutanan.

²⁴ VECO dan Yayasan Pahadang Manjuru melakukan pendampingan warga dalam upaya melakukan kegiatan produksi pertanian menuju desa mandiri pangan. Pendampingan dilakukan kepada Gapoktan dalam pengembangan kapasitas berorganisasi, seperti pembelajaran yang terkait dengan manajemen kegiatan produksi-bercocok tanam, administrasi pembukuan dan keuangan serta pemasaran produksi pertanian. Hasil produksi pertanian yang dipasarkan melalui satu pintu oleh Gapoktan dengan cara menyewa mobil, membuat harga sayuran yang dijual jauh lebih kompetitif sehingga para petani lebih untung.

Kebijakan pemerintah desa untuk mengalokasikan ADD bagi pembangunan pertanian juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Eno Neontes Kabupaten TTS NTT. Anggaran itu digunakan untuk penyediaan bibit sayur-sayuran dan jagung, sarana produksi pertanian seperti traktor dan pompa air, serta perguliran ternak babi, sapi, dan kambing.²⁵ Dari tahun 2007-2011, persentase dana ADD yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan desa berkisar 33% - 81% sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Persentase ADD terhadap Bidang Ketahanan Pangan Desa Eno Neontes Tahun 2007-2011

Tahun	ADD (Rp.)	Ketahanan Pangan (Rp.)	Persentase
2007	70.026.316	40.600.000	57,98%
2008	67.489.463	54.942.624	81,41%
2009	67.791.585	31.750.000	46,83%
2010	68.104.910	27.403.437	40,24%
2011	59.925.582	20.150.000	33,63%

Sumber: Peraturan Desa Eno Neontes tentang APBD Tahun 2007-2011

Kemampuan teknokratis dan politis pemerintah desa dalam memfasilitasi program bidang pertanian pada umumnya dan ketahanan pangan khususnya, dilengkapi pula dengan kemampuan mengkonsolidasikan segenap potensi kelembagaan desa. Sebagai contoh, Pemerintah Desa Mbatakpidu memperkuat kerjasama dengan tiga organisasi yang paling menonjol yang selama ini menjadi mitra pemerintahan desa di dalam mengerakkan pembangunan desa, yaitu: (1) organisasi gabungan kelompok tani (Gapoktan), (2) organisasi perempuan desa, seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), PKK dan (3) organisasi adat.

Pemanfaatan kelembagaan adat untuk menggerakkan kegiatan ketahanan pangan sangat efektif untuk memperoleh dukungan warga. Sebagai contoh, untuk mendistribusikan berbagai bantuan/program

²⁵ Selain Desa Eno Neontes, desa-desa lain di Kecamatan Noebeba yang juga mengalokasikan ADD untuk pertanian misalnya Desa Oepliki dan Desa Naip untuk pembelian bibit kelompok tani. ADD di desa Naip sebagian dialokasikan pada tiga kelompok tani masing-masing sebesar Rp. 450.000,- sedangkan ADD di desa Oepliki sebagian dialokasikan untuk 8 kelompok tani masing-masing Rp. 550.000,-

yang ada dilakukan dengan cara memberikannya melalui pimpinan-pimpinan *kabuhi* (klan), tetapi jika program atau bantuan tersebut tidak cukup maka sistem pembagian atau distribusinya dilakukan dengan cara per kampung, karena satu kampung bisa terdiri dari beberapa klan yang mendiaminya. Dengan cara seperti ini cukup mampu meredam potensi-potensi kecemburuan sosial antar klan atau antarkampung.²⁶

Emansipasi desa hasil kolaborasi warga dan pemerintahan desa pada akhirnya mampu memberikan bukti untuk mewujudkan ketahanan pangan desa. Di Desa Mbatakpidu, jika pada beberapa tahun sebelumnya, yakni sekitar bulan Desember, Januari dan Februari biasanya banyak warga yang datang ke kantor desa untuk memanfaatkan keberadaan lumbung pangan (beras), tetapi sejak bulan Desember 2011, Januari dan Februari 2012, hampir jarang ditemukan warga masyarakat yang datang untuk meminta bantuan dari lumbung pangan. Hal ini menjadi indikator bahwa saat ini tingkat kecukupan pangan di tengah-tengah masyarakat sedang berada dalam kondisi aman sehingga tidak banyak lagi warga yang datang membeli beras dari lumbung pangan. Selain itu, warga Desa Mbatakpidu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk konsumsi kesehariannya, tetapi juga mampu sebagai *suplayer*, khususnya sayur-sayuran dan cabe. Produk hasil pertanian berupa sayuran dari Desa Mbatakpidu kini mulai terkenal di lokasi pasar Kota Waingapu. Bahkan, untuk produk sayuran sudah mulai pula pemasarannya terdistribusi di beberapa hotel di Kota Waingapu.²⁷

D. Kesimpulan

Ancaman atas ketahanan pangan di Indonesia terletak pada ketidakberpihakan pemerintah pada para petaninya sendiri. Kebijakan tentang pangan hanya mementingkan ketersediaan pangan, tanpa memperdulikan darimana asalnya. Pada kenyataannya, ketersediaan pangan itu tidak bisa dipenuhi oleh petani kita sendiri, melainkan mengandalkan impor. Kondisi ini sangat bertentangan dengan predikat sebagai negara agraris. Petani kita tidak sejahtera, negara tidak mampu memenuhi kebutuhan warga, negara tergantung pada suplai pangan dari negara lain, dan seluruh warga negara senantiasa berada dalam ancaman rawan pangan.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan membutuhkan kebijakan yang komprehensif, sejak dari hulu sampai hilir dalam proses produksi

²⁶ Abdur Rozaki, *ibid*, hlm. 18.

²⁷ Abdur Rozaki, *ibid*, hlm. 15.

dan distribusi pangan. Kuncinya adalah mengembalikan kedaulatan sebagai negara agraris yang melindungi petani sebagai investor pembangunan bidang pertanian. Dalam kaitannya dengan kedaulatan pangan, Bustanul Arifin merumuskan empat tingkatan yang berbeda: swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai kedaulatan bagi negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, tanpa takut dan ragu serta tercampuri kepentingan kekuatan lain, serta menjamin hak atas pangan bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem usaha pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.²⁸

Menempatkan desa sebagai basis ketahanan pangan telah dibuktikan oleh beberapa desa yang dikupas di atas. Ternyata, masyarakat desa sangat adaptif terhadap krisis pangan.²⁹ Warga desa memiliki kearifan lokal untuk mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dan memberi kontribusi pangan pada desa atau wilayah lainnya. Emansipasi warga diwujudkan dalam pembaharuan pola pertanian, diversifikasi produksi pertanian, revitalisasi institusi lokal (kelompok tani, adat) untuk mendukung produksi dan distribusi hasil tani. Emansipasi warga didukung dengan kinerja pemerintahan desa untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan pertanian. Program dan kegiatan sebagai tindak lanjut dari kebijakan didasarkan permasalahan pangan warga di tengah potensi/asset lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Program dan kegiatan tersebut didukung dengan ADD yang di beberapa desa diprioritaskan bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Emansipasi desa dalam mewujudkan ketahanan pangan, di samping perlu dukungan regulasi di tingkat nasional dan daerah, membutuhkan pula kelembagaan di tingkat pusat yang khusus menangani pangan. Berbagai lembaga yang telah ada saat ini, seperti Dewan Ketahanan Pangan dan Badan Ketahanan Pangan, ternyata belum bisa berfungsi optimal. Oleh sebab itu perlu dibentuk lembaga yang khusus mengurus pangan setingkat kementerian yang langsung bertanggung jawab pada presiden. Pada masa lalu ada Kementerian Negara Urusan Pangan yang membuat perencanaan, kebijakan dan berkoordinasi

²⁸ Bustanul Arifin, *Berharap Banyak pada Revisi Undang-Undang Pangan*, <http://metrovtnews.com/read/analisdetail/2011/02/07/136/berharap-banyak-pada-revisi-undang>, hlm. 2.

²⁹ Susetiawan, *Adaptasi Masyarakat Terhadap Krisis Pangan*, (*Jurnal Renai, Jerat Krisis Pangan dan Energi*, Tahun VIII No.1. 2008), hlm. 38.

dengan instansi lain. Tetapi, setelah tidak ada lagi Kantor Kementerian Pangan, koordinasi antar instansi untuk menetapkan perencanaan dan membuat kebijakan pangan secara komprehensif tidak ada lagi. Justru sering timbul polemik antar instansi pemerintah yang satu menentang kebijakan instansi pemerintah lainnya. Sebagai contoh, polemik masalah impor garam antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perdagangan. Polemik tersebut terjadi karena masing-masing instansi menonjolkan egoisme sektoral.³⁰

Mengembalikan kedaulatan negara di bidang pertanian merupakan pilihan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan negara. Petani harus memperoleh prioritas dalam kebijakan pembangunan, negara melindungi dan memberi subsidi pada petani sebagai garda terdepan dalam pembangunan pertanian. Lahan-lahan pertanian ada di desa, para petani pun tinggal dan berusaha di desa, sehingga desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Sudah saatnya kebijakan dan anggaran pembangunan diarahkan ke desa, membangun Indonesia dari desa.

³⁰ *Pangan Harus Dikelola Lembaga Setingkat Menteri*, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/20/320/531829/pangan-harus-dikelola-lembaga-setingkat-menteri>, hlm. 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki, *Dari Desa Krisis Pangan Menuju Mandiri Pangan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID – IRE, 2012.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, *Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005–2010*, www.pustaka-deptan.go.id/bppi/lengkap/bpp05004.pdf, diakses pada tanggal 31 Juli 2012.
- Bustanul Arifin, *Penurunan Produksi Pangan dan Harapan pada GP3K*, www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/11/05/215/Penurunan-Produksi-Pangan-dan-Harapan-pada-GP3K, diakses pada tanggal 31 Juli 2012.
- Bustanul Arifin, *Berharap Banyak pada Revisi Undang-Undang Pangan*, <http://www.metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/02/07/136/berharap-banyak-pada-revisi-undang>, diakses pada tanggal 31 Juli 2012.
- Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan World Food Programme, *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia*, Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan World Food Programme, 2009.
- Dyah Widuri, Agustinus Banu dan Bambang Hidayana, *Membangun Lumbung Menuju Ketahanan Pangan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID – IRE, 2012.
- Francis Wahono, *Kedaulatan Pangan: Agri-Culture bukan Agri-Business, Mensiasati Negara Lupa Bangsa*, dalam Suharman (editor), *Bunga Rampai Pemikiran Pedesaan 2002-2008*, Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, 2008.
- James C. Scoot, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Krisdyatmiko (editor), “Pengembangan Strategi Penyuluhan di Tengah

- Perubahan Konfigurasi Politik dan Orientasi Pembangunan”, pengantar editor dalam S.Djuni Prihatin, *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani: Dalam Ancaman*, Yogyakarta: Intan Cendekia, 2010.
- Michael H. Hart, *The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*, New York: Citadel Press Book, 1992.
- Ninik Handayani, Syafrudin dan Sutoro Eko, *Transformasi Modal Sosial ke Modal Ekonomi: Pelajaran Berharga Dari Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat*, *Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID – IRE, 2012.
- Ninik Handayani, Zuriati dan Sutoro Eko, *Gerakan Membangun Kemandirian Desa: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*, *Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID – IRE, 2012.
- Peter Stalker, *Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*, Jakarta: Bappenas-PBB, 2007.
- Susetiawan, “Adaptasi Masyarakat Terhadap Krisis Pangan”, dalam *Jurnal Renai, Jerat Krisis Pangan dan Energi*, Tahun VIII No.1. 2008.
- Titok Haryanto, *Warga Bergerak Melawan Kemiskinan: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara*, *Stocktake: Pembelajaran dari Program ACCESS Tahap II Terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kemendagri - ACCESS AUSAID – IRE, 2012.
- Witoro, *Memperdagangkan Kehidupan: Menelisik Nasib Beras di Bawah Pasal-pasal WTO*, dalam Sugeng Bahagijo (editor), *Globalisasi Menghempas Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- , *Balada Negeri Impor*, dalam “Kedaulatan Rakyat”, 31 Juli 2012.
- , *Pangan Harus Dikelola Lembaga Setingkat Menteri*, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/20/320/531829/pangan-harus-dikelola-lembaga-setingkat-menteri>, diakses pada tanggal 31 Juli 2012.
- Keputusan Kepala Desa Mbatakpidu No.03/2011 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Desa Sektor Pertanian dan Kehutanan.
- Keppres Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
- Perpres Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
- PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Krisdyatmiko, *Kemampuan Desa dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan*

UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Krisdyatmiko, adalah Peneliti di *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Staf Pengajar di Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM.

